

**Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan
Perusahaan Terhadap Pengungkapan Wajib Dengan
Shariah Board Quality Sebagai Pemoderasi
(Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 – 2021)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Ayu Mei Lestari

NIM : 31401700209

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB DENGAN
SHARIAH BOARD QUALITY SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 – 2021)**

Disusun Oleh :

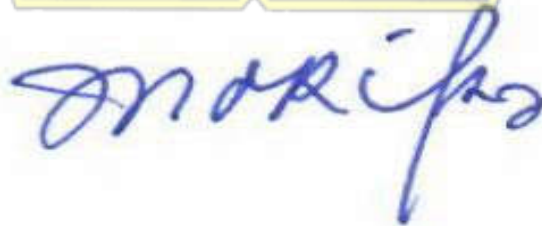
Ayu Mei Lestari

NIM : 31401700209

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 24 Agustus 2024

Pembimbing



Prof.Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211490002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB DENGAN
SHARIAH BOARD QUALITY SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 – 2021)**

Disusun Oleh :

Ayu Mei Lestari
NIM : 31401700209

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 28 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,

Prof.Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211490002

Penguji 1,

Penguji 2,

Dr. H. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211492004

Sri Sulistyowati, SE.,M.Si.,Akt.
NIK. 211403017

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Semarang, 28 Agustus 2024

Ketua Program Studi Akuntansi,

Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Phd Ak., CA.,IFP.,AWP.
NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Ayu Mei Lestari
NIM : 31401700209
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Wajib Dengan *Shariah Board Quality* Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 – 2021)”** adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Adapun pendapat orang lain yang ada di penelitian ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 28 Agustus 2024

Penulis



Ayu Mei Lestari
31401700209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke Surga – Imam Hasan Al-Basri”

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

“*Man Jadda WaJada* . Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”

“Doa tanpa usaha itu sia-sia dan usaha tanpa doa itu sombong”

“Bukan Aku Yang Kuat Tapi Doa Ibuku Yang Hebat”

PERSEMBAHAN

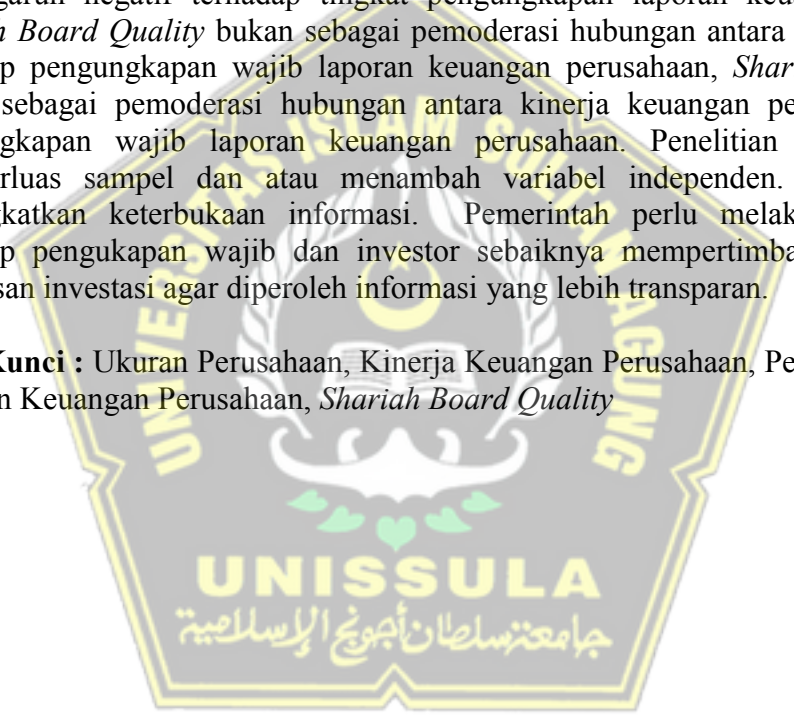
“Untuk Bapak dan Ibu tercinta sebagai pendidik pertama yang selalu mendukung dan meridhoi putrinya untuk menggapai cita-cita dan menuntut ilmu setinggi-tingginya.”

“Untuk Ibu Prof.Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan membuka pintu seluas-luasnya sehingga saya dapat belajar banyak selama melakukan penelitian.”

ABSTRAK

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini dilakukan guna mengkaji pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan dengan shariah board quality sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK dengan teknik purposive sampling didapatkan 90 sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa annual report yang diunduh dari website resmi BEI maupun website resmi perbankan yang kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan, *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan, *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dan atau menambah variabel independen. Perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan informasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pengungkapan wajib dan investor sebaiknya mempertimbangkan size dalam keputusan investasi agar diperoleh informasi yang lebih transparan.

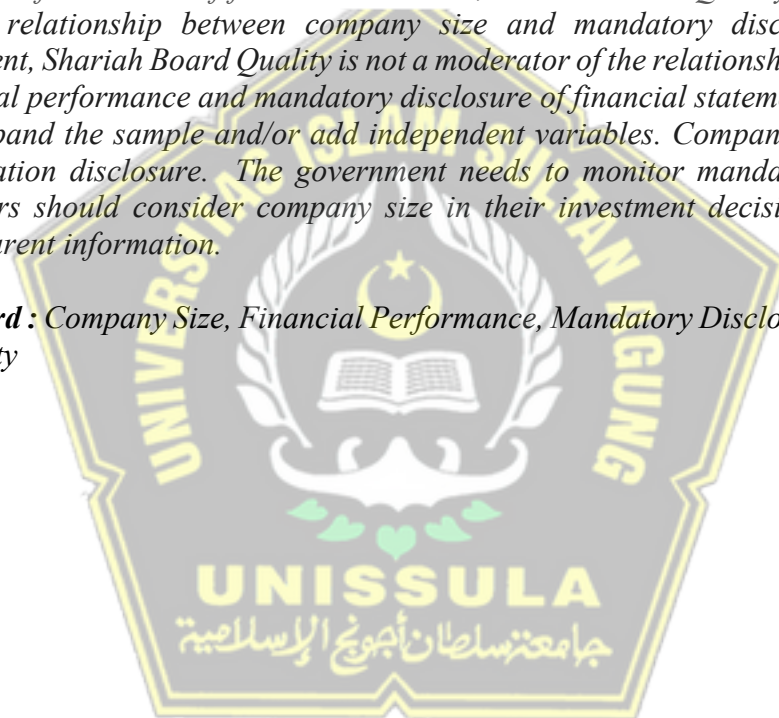
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Perusahaan, Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Perusahaan, *Shariah Board Quality*



ABSTRACT

This research using a quantitative approach was conducted to examine the influence of company size and company financial performance on mandatory disclosure of financial reports with sharia board quality as a moderating variable. The population of this research is sharia banking in Indonesia for the 2019 - 2021 period which includes Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units registered with the OJK. Using a purposive sampling, 90 research samples were obtained. The data used is secondary data in the form of annual reports downloaded from the official IDX website and the official banking website, multiple linear regression analysis was conducted using SPSS 26. The results of this research show that company size has a positive effect on the mandatory disclosure of financial statement, while the company's financial performance has a negative effect. on the level of disclosure of financial statement, Shariah Board Quality is not a moderator of the relationship between company size and mandatory disclosure of financial statement, Shariah Board Quality is not a moderator of the relationship between company financial performance and mandatory disclosure of financial statement. Future research can expand the sample and/or add independent variables. Companies need to increase information disclosure. The government needs to monitor mandatory disclosure and investors should consider company size in their investment decisions to obtain more transparent information.

Keyword : *Company Size, Financial Performance, Mandatory Disclosure, Shariah Board Quality*



INTISARI

Pentingnya pengungkapan laporan keuangan dalam pasar modal sebagai sumber utama informasi bagi pemegang saham dan investor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang pengungkapannya diatur oleh SAK No 1 Tahun 2007 dan peraturan OJK untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, meskipun ada peraturan OJK yang mengatur pengungkapan wajib, tingkat kepatuhan perusahaan masih rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kinerja keuangan mempengaruhi luas pengungkapan wajib, tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah penerapan Islamic Corporate Governance dapat memperkuat pengungkapan wajib laporan keuangan. Teori Keagenan dan Teori Sinyal merupakan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 4 hipotesis yaitu yang **pertama**, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Wajib Perusahaan. **Kedua**, Kinerja Keuangan Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib perusahaan. **Ketiga**, *Shariah Board Quality* dapat memperkuat hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Wajib Perusahaan. **Keempat**, *Shariah Board Quality* dapat memperkuat hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Wajib Perusahaan

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan populasi penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK dengan teknik sampling yang

digunakan adalah teknik purposive sampling sehingga didapatkan 90 sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa annual report yang diunduh dari website resmi BEI maupun website resmi perbankan yang kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 26

Setelah dilakukan pengujian hipotesis, ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan, *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan, *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dan atau menambah variabel independen. Perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan informasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pengungkapan wajib dan investor sebaiknya mempertimbangkan size dalam keputusan investasi agar diperoleh informasi yang lebih transparan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Atas izin, karunia, dan petunjuk Allah SWT, penelitian yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Pengungkapan Wajib dengan *Shariah Board Quality* sebagai Pemoderasi (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 - 2021)" dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Program Sarjana I Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, maka penelitian ini akan diselesaikan.

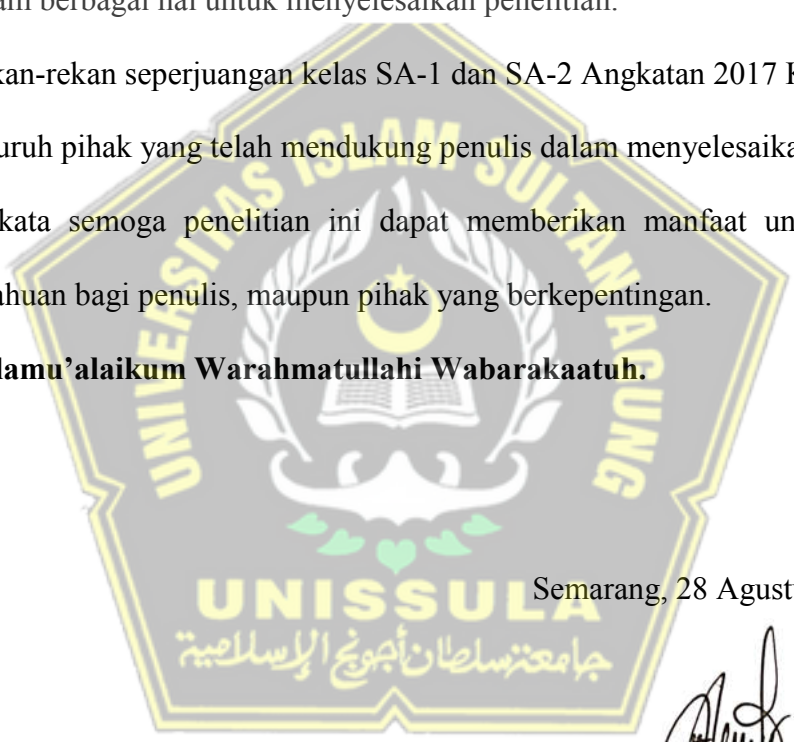
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata selesai, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan koreksi yang membangun sebagai bahan masukan ilmiah yang bermanfaat. Tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si beliau sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA beliau sebagai Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Indri Kartika, S.E., M.Si., Ak., CA beliau sebagai dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan sangat sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak/Ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan serta membantu dalam kelancaran proses perkuliahan.

5. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Krisdiyono dan Ibu Nanik Dwi Haryani yang dengan senantiasa selalu memberikan dukungan dengan segala rasa cinta dan kasih sayang yang tidak pernah surut, dan juga yang telah mendidik dan doa kepada penulis.
6. Kepada Kakak-kakak serta Adik penulis yang telah banyak membantu, memberi semangat dan dukungan selama penulis mengerjakan penelitian ini.
7. Sahabat penulis Tyas ,Cita Ardia, dan Ela yang memberi inspirasi dan mendukung dalam berbagai hal untuk menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan kelas SA-1 dan SA-2 Angkatan 2017 Kelas Sore Seroja
9. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis, maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



Semarang, 28 Agustus 2024

Ayu Mei Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
<u>DAFTAR ISI</u>	xiii
<u>DAFTAR TABEL</u>	xvi
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xvii
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xviii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<u>BAB II KAJIAN PUSTAKA</u>	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2 Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>).....	12
2.1.3 Pengungkapan Wajib (<i>Mandatory Disclosure</i>).....	13
2.1.4 Kinerja Keuangan.....	17
2.1.5 Ukuran Perusahaan.....	20

2.1.6	<i>Shariah Board Quality</i>	21
2.1.7	Penelitian-Penelitian Terdahulu	23
2.2	Hipotesis.....	31
2.2.1	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib oleh perusahaan	31
2.2.2	Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib oleh perusahaan.	32
2.2.3	Pengaruh <i>shariah board quality</i> dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan wajib oleh perusahaan.....	34
2.2.4	Pengaruh <i>Shariah Board Quality</i> dalam memoderasi hubungan kinerja keuangan perusahaan dengan pengungkapan wajib oleh perusahaan.	35
2.3	Kerangka Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
3.1.	Jenis Penelitian.....	37
3.2.	Populasi dan Sampel.....	37
3.2.1.	Populasi	37
3.2.2.	Sampel	37
3.3.	Sumber dan Jenis Data	38
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5.	Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.5.1.	Variabel	39
3.5.2.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.6.	Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.6.2.	Analisis Regresi dengan Moderasi	44
3.6.3.	Pengujian Hipotesis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Gambaran Umum Sampel Penelitian	50

4.2 Uji Asumsi Klasik	55
4.2.1 Uji Normalitas	56
4.2.2 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.3 Uji Autokorelasi	58
4.2.4 Uji Multikolonieritas	59
4.3 Analisis Regresi.....	60
4.3.1 Model Regresi	60
4.4 Pengujian Hipotesis.....	63
4.4.1 Uji F.....	63
4.4.2 Uji t.....	64
4.4.3 Koefisien Determinasi.....	66
4.5 Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
Lampiran 1	84
Lampiran 2	89
Lampiran 3	90
Lampiran 4	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1. Proses Sampling.....	51
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	56
Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.5. Tabel Hasil Uji Durbin-Watson	59
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolonieritas	60
Tabel 4.7. Hasil Uji Analisis Regresi.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	64
Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	36
Gambar 4.1 P-P Plot & Histogram dari Regresi Standar Residual	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Indeks Pengungkapan.....	84
Lampiran 2 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	89
Lampiran 3 Tabulasi Data Variabel Penelitian	90
Lampiran 4 Output SPSS 26	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu isu utama di pasar modal. Informasi ini penting karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan utama bagi banyak orang yang menggunakannya untuk membuat keputusan ekonomi, terutama investor dan pemegang saham yang ingin mengetahui apa tujuan informasi mereka (Abbas *et al.*, 2020). Menurut SAK No 1 Tahun 2007, laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Aturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan diperlukan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Karena tanpa peraturan ini, sangat mungkin perusahaan menyembunyikan informasi penting tentang perusahaan yang seharusnya diungkapkan kepada publik. Informasi yang tidak diungkapkan tentu saja akan merugikan pemangku kepentingan.

Toshiba mengejutkan dunia ketika mengumumkan pada bulan Mei 2015 bahwa mereka harus merevisi perhitungan pendapatan mereka selama tiga tahun terakhir karena skandal akuntansi internal. Karena Toshiba telah menjadi simbol kekuatan perusahaan Jepang, pengumuman tersebut mengejutkan. Toshiba telah melakukan *accounting fraud* yang menyebabkan laba yang

diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan, menurut penyelidikan menyeluruh. Hal tersebut menyebabkan nama Toshiba kemudian dikeluarkan dari indeks saham dan mengalami penurunan penjualan yang signifikan.

Kasus lain yang terjadi di Indonesia pada PT. Hanson International Tbk pada tahun 2016 melakukan kesalahan dimana berdasarkan informasi yang diberikan kepada auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, perusahaan melakukan prosedur audit secara tidak profesional untuk menentukan apakah laporan keuangan tahunan perusahaan Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak. Pernyataan yang keliru tersebut menjadi masalah. Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. Sehingga OJK menjatuhkan sanksi kepada Benny Tjokrosaputro alias Bentjok, Direktur utama Hanson International, denda sebesar Rp 5 miliar karena terbukti mengabaikan regulasi pasar modal karena sejak awal sudah merasakan pendapatan dan tidak memberikan pemahaman transaksi dan pembelian dalam laporan keuangan MYRX tahun 2016. Sementara, Hanson kena sanksi denda Rp 500 juta dan diperintahkan OJK untuk menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan akhir 2016 tersebut. Direktur Hanson International lainnya Adnan Tabrani juga dinilai

bertanggungjawab atas pelaporan ini sehingga dia juga dijatuhi sanksi sebesar Rp 100 juta.

Dari kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan dan transparansi laporan keuangan ini akan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kepatuhan dan ketertiban dari perusahaan terhadap PSAK dan peraturan OJK yang mengakibatkan permasalahan terhadap laporan keuangan belum sepenuhnya teratasi di Indonesia.

Pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 2016 tentang penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu item-item pengungkapan wajib secara terperinci juga diatur dalam SAK Konvergensi IFRS. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai tingkat yang ideal yakni 100%. Namun penerapan peraturan tersebut nyatanya belum mampu menjamin terlaksananya praktik pengungkapan yang lebih tinggi. Hal tersebut terbukti dengan temuan hasil penelitian. Menurut Maharani & Budiasih (2016) menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 rata-rata pengungkapan sebesar 48,3%. (Abbas *et al.*, 2020) periode penelitian 2014-2018 rata-rata pengungkapan 82,1 %. (Alvionita & Taqwa, 2015) tingkat kepatuhan pengungkapan rata-rata 66,856%. (Amrin, 2018) tingkat pengungkapan wajib adalah sebesar 44,55%. (Istiningrum, 2016) rata-rata tingkat pengungkapan wajib yaitu 63% yang berarti masih di bawah kriteria yang disyaratkan oleh Bapepam. (Serly &

Susanti, 2021) rata-rata hasil dari pengungkapan perusahaan non keuangan pada laporan tahunan perusahaan mencapai 69,65%. (Jarwono & Nasir, 2020) pengungkapan dan transparansi dengan nilai rata-rata sebesar 81,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia belum melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan aturan OJK. Beberapa perusahaan ditemukan secara sukarela mengungkapkan informasi dalam jumlah besar, sementara yang lain hanya mengungkapkan dengan jangkauan yang minimal. Namun demikian sebagaimana sebuah indeks pengungkapan, tidak semua perusahaan akan memberikan pengungkapan yang maksimal atas kondisi perusahaan yang selanjutnya hal tersebut menjadi bahan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan riset-riset sebelumnya dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan diantaranya adalah : ukuran perusahaan dan kinerja keuangan.

Ukuran perusahaan dapat digambarkan pada seberapa besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang dapat di gambarkan kepada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aset perusahaan . Alasan kecenderungan perusahaan besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dijelaskan dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar lebih terbuka terhadap pengawasan publik daripada perusahaan kecil, mereka cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Perusahaan besar cenderung lebih kompleks dan kompleksitas membutuhkan lebih banyak pengungkapan (Nassreddine, 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan wajib (Nassreddine, 2016); (Pradipta et al., 2016); (Amrin, 2018); (Permata, 2013); (Santioso & Yenny, 2012); (Widati & Wigati, 2011); (Alfiani, 2019); (Agustina, 2012). Dan yang tidak berpengaruh diperoleh dalam penelitian (Istiningrum, 2016); (Maharani & Budiasih, 2016).

Kinerja keuangan sering diartikan sebagai penetapan metrik tertentu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan (Suciwati et al., 2016). Karena rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen, yang tercermin dalam ketidakseimbangan hasil investasi melalui aktivitas penjualan, rasio profitabilitas baik untuk mengukur kinerja keuangan karena dapat mengukur kinerja dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan dalam mengelola modal dan kewajibannya (Suciwati et al., 2016).

Rendahnya profitabilitas perusahaan menunjukkan kurang baiknya kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan serta reaksi pasar juga akan semakin buruk. Perusahaan dalam kondisi seperti ini biasanya dalam menyampaikan laporan keuangan akan cenderung terlambat atau tidak tepat waktu. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa kinerja manajemen baik. Tingginya profitabilitas perusahaan merupakan berita baik yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Sehingga perusahaan dalam kondisi seperti ini cenderung tepat waktu atau tidak akan menunda menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui penyampaian laporan keuangan (Pratiwi, 2015).

Riset (Widati & Wigati, 2011); (Pratiwi, 2015); (Alfiani, 2019) membuktikan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib namun penelitian (Abbas et al., 2020); (Pradipta et al., 2016); (Maharani & Budiasih, 2016); (Widjayanti, 2015); (Mahardikasari & Aryani, 2019); (Santioso & Yenny, 2012); (Sinurat & Sembiring, 2016); (Agustina, 2012) membuktikan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian khususnya kinerja keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib perusahaan mengindikasikan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat bersifat kondisional. Untuk itu penerapan *corporate governance* dipertimbangkan dapat menjadi variabel kondisional yang dimaksud. Perusahaan yang memiliki penerapan *corporate governance* yang baik akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan pengungkapan perusahaan yang lebih luas.

Tujuan umum tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan lingkungan pelaporan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, independen, dan adil, yang merupakan cerminan dari prinsip universal agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mengurangi kontradiksi antara prinsip-prinsip materialisme dalam kehidupan dan nilai-nilai Islam yang berlaku, sehingga *Islamic Corporate Governance* dapat menjadi pilihan. Penerapan *Islamic Corporate Governance* untuk mencapai tata kelola yang baik akan bergantung pada sejauh mana perusahaan bersedia menerapkannya dengan baik.

Elemen paling penting yang membuat bank syariah berbeda dari bank konvensional adalah adanya pengawasan syariah. Oleh karena itu, dalam sektor keuangan Islam, pengawasan syariah adalah masalah yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Pembentukan syariah board atau dewan pengawas syariah merupakan syarat penting dalam pendirian bank syariah. Karena *shariah board* bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan berbagai aspek aturan syariah dan menjamin bahwa seluruh transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah (Mahardikasari & Aryani, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menyelidiki apakah pengungkapan wajib dapat menjadi lebih kuat jika dijalankan oleh perusahaan yang kinerja keuangannya yang baik serta dukungan penerapan *Islamic Corporate Governance* yang lebih baik dimana ditentukan oleh karakteristik dewan pengawas syariah.

Hasil- hasil penelitian yang tidak konsisten menarik untuk diteliti kembali pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Penelitian ini mengacu pada Ajili & Bouri (2018) dengan menambahkan variable ukuran perusahaan sebagai pengembangan dari penelitian Farook et al (2011). Ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pengungkapan wajib oleh perusahaan didukung oleh teori keagenan bahwa perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari konflik antar perusahaan dengan para *stakeholders* nya.

Untuk itu penelitian ini menentukan judul “ Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Wajib Dengan *Shariah Board Quality* Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019 – 2021) ”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana konsep transparansi dan akuntabilitas perusahaan, pengungkapan wajib akan ditentukan oleh sejauh mana kondisi perusahaan dan keinginan pengelola perusahaan. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib perusahaan masih belum konsisten. Untuk itu penelitian ini menggunakan *Shariah Board Quality* untuk diujikan sebagai pemoderasi hubungan tersebut. Untuk itu maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan ?
2. Bagaimanakah pengaruh Kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan ?
3. Bagaimanakah *Shariah Board Quality* memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan ?
4. Bagaimanakah *Shariah Board Quality* memoderasi pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
2. Menguji pengaruh Kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
3. Menguji *Shariah Board Quality* memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
4. Menguji *Shariah Board Quality* memoderasi hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat, baik praktis maupun teoritis, diharapkan bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana dalam observasi ilmiah, khususnya di bidang akuntansi, untuk memperluas cakupan pengetahuan tentang pengungkapan wajib laporan keuangan . Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian tambahan tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

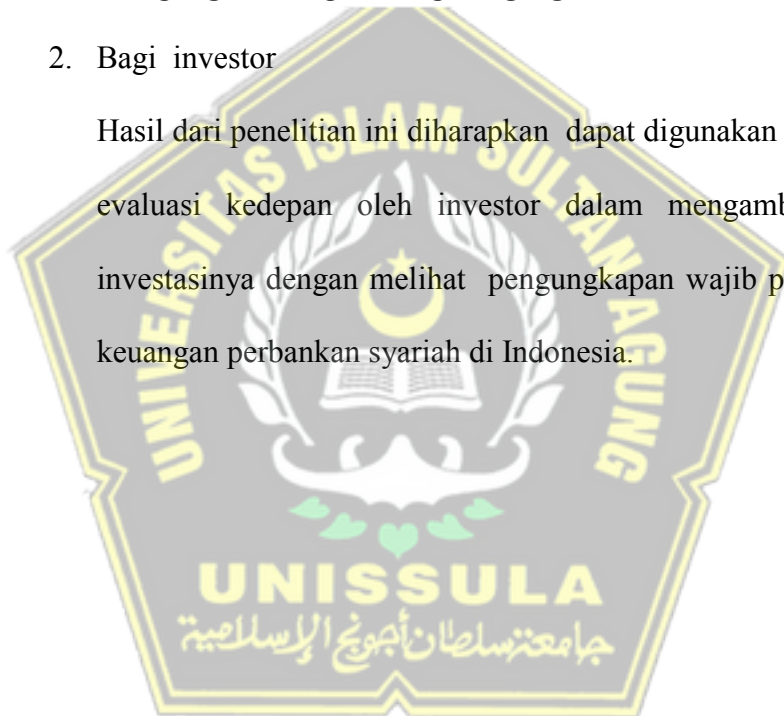
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pihak, diantaranya :

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait, pemaksimalan tingkat luasnya pengungkapan wajib laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Yang mana berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor.

2. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepan oleh investor dalam mengambil keputusan investasinya dengan melihat pengungkapan wajib pada pelaporan keuangan perbankan syariah di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Hal ini memperjelas bahwa pihak yang memberi mandat kepada agen untuk bertindak atas nama principal, sedangkan pihak yang memberi mandat kepada agen untuk menjalankan bisnis adalah prinsipal. Prinsipal telah mempercayakan agen dengan tanggung jawab untuk melaksanakan instruksi mereka (Susanto & Ardini, 2016).

Kesenjangan kepentingan yang ada antara pemilik dan manajemen adalah sumber masalah yang muncul dari hubungan keagenan ini. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Kontribusi teori keagenan terhadap penelitian ini adalah dimana teori ini mendalilkan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan lebih banyak

informasi secara sukarela untuk mengurangi biaya agensi yang timbul antara perusahaan dengan para *stakeholders* nya (Nassreddine, 2016).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Houston (2017) menyatakan bahwa sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. *Signalling theory* juga menjelaskan mengapa perusahaan harus mempunyai niat untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal (Dewi & Ekadjaja, 2020)

Masalah yang ditimbulkan dari hubungan *signalling* ini adalah asimetri informasi di antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaannya sendiri dan prospek yang di masa yang akan datang daripada pihak luar. Hal ini menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan tidak membeli saham karena penilaiannya terhadap perusahaan yang rendah.

Kinerja teori sinyal disini menekankan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan wajib perusahaan dengan memberikan sinyal positif kepada investor melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran akan prospek usaha di masa datang.

Kontribusi teori sinyal terhadap penelitian ini adalah dimana teori sinyal mengusulkan itu perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang besar bermaksud untuk mengurangi asimetri informasi dan menandakan kualitas dan

nilai perusahaan dengan memberikan lebih banyak informasi kepada pihak eksternal (Abbas et al., 2020)

2.1.3 Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Laporan keuangan tahunan memiliki pengungkapan informasi yang dapat dibagi dua yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum mengenai informasi yang harus diungkapkan oleh setiap perusahaan. Pemerintah atau badan pembuat standar (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI dan Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam) telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi bagi perusahaan yang *go public*. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan perusahaan bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan dan pengungkapan yang diungkap oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Maharani & Budiasih, 2016).

Telah dinyatakan bahwa pengungkapan wajib atau *mandatory disclosure* merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan *go public* yang terdaftar di pasar modal karena sudah diatur diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti yang dinyatakan diatas (Pradipta et al., 2016).

Pengungkapan sukarela ialah untuk mengungkapkan informasi yang melebihi persyaratan minimum yang ditentukan Standar Akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, organisasi dapat dengan bebas memilih penyampaian

informasi laporan keuangan secara sukarela yang dianggap relevan untuk mendukung pengambilan keputusan (Liza & Arza, 2019).

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Amrin, 2018).

Ketentuan umum pengungkapan adalah bahwa laporan bank syariah harus mengungkapkan informasi umum mengenai bank syariah dan informasi tambahan Amrin (2018), misalnya:

- 1) Karakteristik kegiatan bank dan jasa yang diberikan
- 2) Tugas dan kewenangan DPS
- 3) Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat
- 4) Kebijakan akuntansi, pengakuan pendapatan, penyisihan kerugian aktiva produktif, dan konsolidasi laporan keuangan
- 5) Transaksi yang dilarang syariah dan menyelesaikannya;
- 6) Dana yang tidak terikat
- 7) Aktiva produktif (jenis, sektor, jumlah, klasifikasi, penyisihan kerugian, dan aktiva produktif bermasalah)

Hidayah (2008) menyatakan tujuan umum dari pengungkapan adalah untuk memberikan informasi yang dianggap perlu untuk tujuan melindungi, menginformasikan, atau melayani kebutuhan khusus, serta melayani berbagai pihak dengan beragam kepentingan dan mencapai tujuan pelaporan keuangan.

Ketentuan umum tersebut diambil dari intisari PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (iaiglobal.or.id). Adapun beberapa pernyataan standar akuntansi yang akan menjadi operasional variabel ini yakni

- 1) PSAK 102 : Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk : Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
- 2) PSAK 103 : Akuntansi Salam (PSAK 103) untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna' (PSAK 104) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual maupun pembeli.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

- 4) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 : Akuntansi Musyarakah (PSAK 106) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperbolehkan oleh syariah.
- 6) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah (PSAK 107) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa

diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Mereplikasi penelitian sebelumnya, variabel pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dalam penelitian ini diukur dengan dengan tingkat kepatuhan terhadap item-item pengungkapan (*mandatory disclosure items*) yang di atur dalam PSAK 102, PSAK 103, PSAK 104, PSAK 105, PSAK 106, dan PSAK 107 dengan memberikan skor pada item pengungkapan (1) untuk yang item diungkapkan dan 0 untuk yang item yang tidak diungkapkan (Amrin, 2018). Standar pengungkapan yang harus diungkapkan diatur dalam PSAK Syariah. Instrumen pengukuran proporsi pengungkapan yang digunakan adalah item-item pengungkapan yang dikembangkan dari kriteria penilaian *Annual Report* berdasarkan PSAK sebanyak 65 item. Proporsi *disclosure* setiap bank diukur dengan indeks yaitu total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan dengan skor yang diharapkan (maksimal) dapat diperoleh perusahaan tersebut.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Suciwati et al. (2016) bahwa kinerja keuangan kerap diartikan sebagai penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengertian ini senada dengan Faisal et al ., (2017) yang menyatakan kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kinerja dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dalam mengukur kinerja

keuangan, tentunya perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban (Widianingsih, 2018). Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Uraian-uraian diatas menyimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan analisis ukuran tertentu yang dilakukan suatu perusahaan untuk melihat serta mengukur keberhasilan suatu perusahaan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Adapun pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2006) dalam Faisal et al., (2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas
- 2) Kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- 3) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas
- 4) Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 5) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas
- 6) Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 7) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha

Kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk

membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan

Suciwati et al. (2016) dalam penelitiannya memaparkan bahwa rasio profitabilitas baik untuk mengukur kinerja keuangan karena rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin dari laba atas investasi melalui kegiatan penjualan, maka dapat mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan serta efisiensinya dalam mengelola modal dan kewajibannya.

Fahmi (2012) menjelaskan untuk mengukur tingkat profitabilitas dapat digunakan beberapa rasio antara lain :

1) *Gross profit margin* (GPM) Rasio ini menggambarkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan utama perusahaan. Rasio ini membantu untuk memahami laba kotor perusahaan dari penjualan setiap item.

2) *Net Profit Margin* (NPM) *Net Profit Margin* adalah rupiah Indonesia yang mengukur keuntungan yang dihasilkan untuk setiap 1 rupiah yang terjual. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualan. Jika margin kotor mengukur efisiensi produksi penetapan harga, maka rasio juga mengukur efisiensi produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penetapan harga, dan manajemen pajak secara keseluruhan.

3) *Return On Asset* (ROA) *Rasio Return On Asset* ini mengukur kemampuan perusahaan dan memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Rasio *Return On Asset* yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen sehingga semakin rendah rasio ini berarti tidak efisien.

4) *Return On Equity* (ROE) Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. *Return On Equity* berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik serta menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham.

Tingginya rasio profitabilitas pada suatu perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan efisiensi manajemen dengan memaksimalkan seluruh aset perusahaan dalam upayanya meningkatkan laba perusahaan (Pradipta et al., 2016).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lainnya (Tandanu & Suryadi, 2020). Definisi yang senada dipaparkan oleh Nugraha & Alfarisi (2020) bahwa Ukuran perusahaan dapat digambarkan pada seberapa besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang dapat digambarkan kepada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total dari aset perusaha.

Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat (Jayanti, 2018). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari seberapa besar transaksi yang dilakukan, seberapa besar nilainya, atau seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan besar memiliki basis pemangku kepentingan yang lebih besar, sehingga kebijakan yang diambil akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil (Ayu & Suarjaya, 2017). Uraian-uraian tersebut dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat.

2.1.6 *Shariah Board Quality*

Corporate governance dalam Islam merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah (Najmudin, 2011).

Senada dengan Najmudin, Bhatti, M & Bhatti, I (2009) menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* mempertimbangkan bagaimana prinsip

ekonomi dan keuangan Islam serta hukum syariah memengaruhi praktik dan kebijakan, seperti penetapan zakat, larangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil. Pemegang saham, pemasok, kreditor, pelanggan, pesaing, dan karyawan semuanya berperan dalam pengambilan keputusan di luar batasan tata kelola perusahaan konvensional (Endraswati, 2015).

Dalam Islam, organisasi bisnis dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada eksploitasi, ketidakadilan, dan kerusakan masyarakat serta memberikan perlindungan penuh atas hak-hak pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan tujuan *corporate governance* konvensional yang lebih menekankan pada bagaimana memaksimalkan kepentingan pemegang saham, meskipun pendekatan berbasis keyakinan yang menyelaraskan perilaku bisnis dengan prinsip-prinsip Syariah, penerapan tata kelola perusahaan Islam tidak menghentikan perusahaan untuk menjadi termotivasi keuntungan sehingga memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Noordin & Kassim, 2019).

Pendekatan yang paling umum untuk melaksanakan tanggung jawab ini adalah membentuk dewan atau komite syariah yang bertanggung jawab untuk mengamati kepatuhan terhadap prinsip dan ajaran syariah (Azid & Alnodel, 2019). Oleh sebab itu, dalam sektor keuangan Islam, pengawasan syariah merupakan masalah yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan yang harus dilakukan oleh *shariah board*. Pada dasarnya, pengawasan syariah adalah proses memastikan bahwa produk atau layanan keuangan yang diberikan mematuhi prinsip-prinsip Islam baik yang melalui konformasinya

dengan norma hukum Islam yang diakui atau tidak melanggar pada sesuatu yang sama (Mahardikasari & Aryani, 2019).

Shariah board atau dewan pengawas syariah tentunya harus memiliki empat karakter yang menentukan kualitas dewan pengawas syariah diantaranya, memiliki pengaruh signifikan adalah jumlah anggota, keanggotaan-ganda, kualifikasi doktor, dan reputasi anggota (Mahardikasari & Aryani, 2019). Variabel moderating *shariah board quality* akan diukur dengan keempat karakter dewan pengawas syariah. Variabel tersebut diukur berdasarkan total nilai dari setiap karakter *sharia supervisory board* atau dewan pengawas syariah yang terdapat dalam penelitian.

2.1.7 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan variabel dependen pengungkapan wajib laporan keuangan dengan menggunakan *shariah board quality* sebagai pemoderasi :

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Nassreddine, 2016)	Determinants of financial information disclosure: A visualization test by cognitive mapping technique	Variabel Independen: Characteristics of the firm and Industry type Variabel Dependen: financial information disclosure	Ukuran perusahaan dan tipe industri perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan
(Abbas et al., 2020)	Financial Factors and Mandatory Disclosure	Variabel Independen: Leverage, Profitability, and Liquidity Variabel Dependen: Mandatory Disclosure	Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib suatu perusahaan berbeda dengan profitabilitas dan likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib suatu perusahaan
(Ajili & Bouri, 2018)	Assesing the moderating effect of Shariah Board on Relationship between Financial Performance and Accounting Disclosure	Variabel Independen: Financial Performance Variabel Dependen: Accounting Disclosure Variabel Moderasi: Shariah Board	Dewan Syariah memiliki peran yang penting dalam pengungkapan laporan keuangan, hingga bisa dikatakan bahwa dewan syariah bisa memberikan efek pemoderasi dalam hubungan antara kinerja keuangan dan pengungkapan laporan keuangan

(Pradipta et al., 2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan (Studi Empiris terhadap Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan, sedangkan leverage, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.
(Maharani & Budiasih, 2016)	Pengaruh Ukuran, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan	Variabel Independen: Ukuran, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan	Umur perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh positif pada pengungkapan wajib, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif pada pengungkapan wajib.
(Widjayanti, 2015)	Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS	Variabel Independen: Proporsi Dewan Komisaris Wanita, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Likuiditas, Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama,	Proporsi dewan komisaris wanita memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Jumlah rapat komite audit,

		Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Jumlah Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS	Proporsi komisaris independen, Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory</i> <i>disclosure</i> Latar belakang pendidikan komisaris utama, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Jumlah komite audit, Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory</i> <i>disclosure</i>
(Amrin, 2018)	Karakteristik Perusahaan dalam Praktik Pengungkapan Wajib pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Independen: Tingkat likuiditas (FDR), tingkat rentabilitas (OER), dan ukuran perusahaan (SIZE) Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel tingkat likuiditas (FDR) dan tingkat rentabilitas (OER) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib sedangkan variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib
(Mahardikasari & Aryani, 2019)	Islamic Corporate Governance dalam	Variabel Independen: Profitabilitas	- Kinerja Keuangan (ROA) tidak berpengaruh

	Memoderasi Hubungan antara Kinerja Keuangan dan Islamic Social Reporting	Variabel Dependen: Islamic Social Reporting Variabel Moderasi: Islamic Corporate Governance Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan dan Leverage	terhadap luas pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> - <i>Islamic corporate governance</i> tidak memoderasi hubungan antara kinerja keuangan (ROA) dan <i>islamic social reporting</i> . - Sedangkan untuk variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>islamic social reporting</i> dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>islamic social reporting</i> .
(Permata, 2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, dan Likuiditas Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan	- Ukuran perusahaan yang diukur dari segi penjualan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan - Kepemilikan saham publik yang diukur melalui jumlah saham

			<p>yang dimiliki oleh publik dibagi total saham memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.</p> <p>- Likuiditas yang diukur melalui current ratio memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan</p>
(Santioso & Yenny, 2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI	<p>Variabel Independen: Rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, porsi saham publik, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur</p>	<p>Likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan</p> <p>Leverage, profitabilitas, porsi saham publik dan umur perusahaan tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib.</p>
(Widati & Wigati, 2011)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Likuiditas,</p>	<p>Ukuran perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan</p>

	terhadap Luas Pengungkapan	Leverage, dan Profitabilitas Variabel Independen: Luas Pengungkapan	terhadap luas pengungkapan Likuiditas dan Leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan
(Sinurat & Sembiring, 2016)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Status Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan, dan Status Perusahaan Variabel Dependen: Pengungkapan Laporan keuangan Perusahaan Manufaktur	Profitabilitas (ROA) dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Leverage (DER) dan status perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan
(Pratiwi, 2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan	Variabel Independen: Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas Variabel Dependen: Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan	Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

			Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan
(Alfiani, 2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Keluasan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan wajib laporan keuangan</p>	Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan, sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan wajib laporan keuangan.
(Agustina, 2012)	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan laporan tahunan	<p>Variabel Independen: Likuiditas, profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan laporan tahunan</p>	Likuiditas, profitabilitas, dan kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan, sedangkan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan laporan tahunan.

2.2 Hipotesis

2.2.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib oleh perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lainnya (Tandanu & Suryadi, 2020). Definisi yang senada dipaparkan oleh Nugraha & Alfarisi (2020) bahwa Ukuran perusahaan dapat digambarkan pada seberapa besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang dapat digambarkan kepada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total dari aset perusahaan.

Adapun teori yang dapat mendukung ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pengungkapan wajib oleh perusahaan yaitu teori keagenan yang dimana teori ini mendalilkan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari konflik antar perusahaan dengan para *stakeholders* nya.

Beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang mendukung variable ini, yakni dari Pradipta et al. (2016), Amrin (2018), Permata (2013), Alfiani (2019) yang sama-sama menyatakan hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan, dimana salah satu pengungkapan laporan keuangan terdapat *mandatory disclosure* atau pengungkapan wajib.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat menyatakan hipotesis yang dapat disimpulkan dengan logika bahwa:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Wajib Perusahaan.

2.2.2 Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib oleh perusahaan.

Kinerja keuangan menurut Suciwati et al (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan kerap diartikan sebagai penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengertian ini senada dengan Faisal et al., (2017) yang menyatakan kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kinerja dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar

Rendahnya profitabilitas perusahaan menunjukkan kurang baiknya kinerja manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan mempengaruhi akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan terhadap perusahaan serta reaksi pasar juga akan semakin buruk. Perusahaan dalam kondisi seperti ini biasanya dalam menyampaikan laporan keuangan akan cenderung terlambat atau tidak tepat waktu. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa kinerja manajemen baik. Tingginya profitabilitas perusahaan merupakan berita baik yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Sehingga perusahaan dalam kondisi seperti ini cenderung tepat waktu atau

tidak akan menunda menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui penyampaian laporan keuangan (Pratiwi, 2015).

Adapun teori yang mendukung kinerja keuangan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan yaitu teori sinyal disini menekankan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan wajib perusahaan dengan memberikan sinyal positif kepada investor melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran akan prospek usaha di masa datang.

Kontribusi teori sinyal terhadap penelitian ini adalah dimana teori sinyal mengusulkan itu perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang besar bermaksud untuk mengurangi asimetri informasi dan menandakan kualitas dan nilai perusahaan dengan memberikan lebih banyak informasi kepada pihak eksternal (Abbas et al., 2020)

Beberapa penelitian yang mendukung variabel kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan rasio profitabilitas. Ada dari Widati & Wigati (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki sebuah perusahaan, maka semakin tinggi juga pengungkapan wajibnya. Pernyataan yang sama dinyatakan oleh Sinurat & Sembiring (2016), Pratiwi (2015), dan Agustina (2012).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat menyatakan hipotesis yang dapat disimpulkan dengan logika bahwa:

H₂: Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Wajib Perusahaan.

2.2.3 Pengaruh *shariah board quality* dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan wajib oleh perusahaan.

Pengungkapan informasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya agensi, untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan penyedia dana, dan untuk mengurangi biaya politik. Alasan kecenderungan perusahaan besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dijelaskan: biaya akumulasi dan pengungkapan informasi tidak tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil; manajemen perusahaan yang lebih besar kemungkinan akan menyadari kemungkinan manfaat dari pengungkapan informasi, seperti daya jual yang lebih besar dan kemudahan pembiayaan yang lebih besar; perusahaan kecil mungkin merasa bahwa pengungkapan informasi penuh dapat membahayakan posisi kompetitif mereka. Selain itu, karena perusahaan besar lebih terbuka terhadap pengawasan publik daripada perusahaan kecil, mereka cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Perusahaan besar cenderung lebih kompleks dan kompleksitas membutuhkan lebih banyak pengungkapan (Nassreddine, 2016).

Widjayanti (2015) menyatakan bahwa *good corporate governance* memengaruhi kepatuhan *mandatory disclosure* pada suatu perusahaan, diiringi oleh Ajili & Bouri (2018). Oleh karena itu, dalam sektor keuangan Islam, pengawasan syariah adalah masalah yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan yang harus dilakukan oleh *shariah board* atau dewan pengawas syariah. Pada dasarnya, pengawasan syariah adalah proses memastikan bahwa produk atau layanan keuangan yang diberikan mematuhi prinsip-prinsip Islam

baik yang melalui konformasinya dengan norma hukum Islam yang diakui atau tidak melanggar pada sesuatu yang sama (Mahardikasari & Aryani, 2019).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat menyatakan hipotesis yang dapat disimpulkan dengan logika bahwa:

H₃: *Shariah Board Quality* dapat memperkuat hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Wajib Perusahaan

2.2.4 Pengaruh *Shariah Board Quality* dalam memoderasi hubungan kinerja keuangan perusahaan dengan pengungkapan wajib oleh perusahaan.

Kinerja keuangan menurut Suciwati et al., (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan kerap diartikan sebagai penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar profitabilitas maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas maka akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan (Sinurat & Sembiring, 2016).

Perusahaan yang berkinerja baik lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi akuntansi berkualitas tinggi. Dikarenakan keinginan manajemen mereka untuk meningkatkan kepercayaan investor, meningkatnya kepercayaan investor menghasilkan valuasi perusahaan yang lebih baik. Selain itu pengungkapan berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan modal dengan persyaratan terbaik yang tersedia. Dari situlah muncul motivasi perusahaan berkinerja tinggi untuk mengungkapkan informasi dengan keinginan mereka untuk membedakan diri mereka dari perusahaan lain (Ajili & Bouri, 2018)

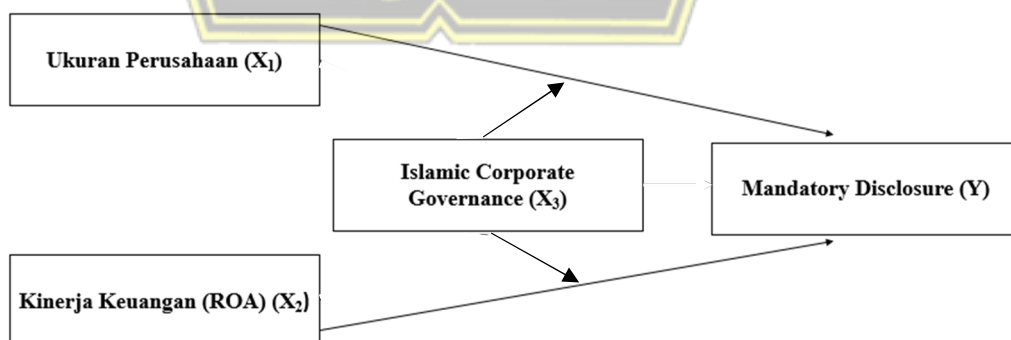
Widjayanti (2015) menyatakan bahwa *good corporate governance* memengaruhi kepatuhan *mandatory disclosure* pada suatu perusahaan, diiringi oleh Ajili & Bouri (2018) dalam jurnal internasionalnya yang menyatakan bahwa dewan syariah dalam *islamic corporate governance* memiliki peran penting dalam pengungkapan laporan keuangan. Uraian tersebut dapat mendukung *shariah board quality* sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara kinerja perusahaan dan pengungkapan wajib.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat menyatakan hipotesis yang dapat disimpulkan dengan logika bahwa:

H₄: *Shariah Board Quality* dapat memengaruhi hubungan antara Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Wajib Perusahaan

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai definisi, teori, dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapatkanlah kerangka pemikiran yang dapat dinyatakan dalam bentuk gambar:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksplanasi yang mana menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain dengan menggunakan hipotesis (Sudaryono, 2017). Penelitian ini juga termasuk penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif dimana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (Suliyanto, 2018).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Istilah "populasi" mengacu pada area generalisasi yang terdiri dari hal-hal atau orang-orang dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh para ilmuwan untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya. (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK.

3.2.2. Sampel

Sampel sering juga disebut sebagai "contoh," yaitu himpunan bagian (subset) dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Teknik pengambilan sampel

menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel yang dipilih sebagai berikut :

1. Kategori perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah tidak termasuk BPRS (hanya Bank umum syariah dan unit syariah);
2. Perbankan syariah tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia;
3. Perbankan syariah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 2019-2021 secara lengkap;
4. Laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan telah diaudit;
5. Perbankan syariah tidak *delisting* pada periode tersebut

3.3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) disebut data sekunder. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat diperoleh melalui media perantara (Sugiyono, 2017). Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan *annual report* perusahaan yang dapat diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website masing-masing perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi, dan pengamatan langsung yang sesuai dengan masalah yang diteliti yang berasal dari dokumentasi serta berbagai *website* penyedia data dan informasi saham lainnya (Sugiyono, 2017).

Metode dilakukan dengan cara mengubah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan dan *annual report* dari masing-masing *website* perusahaan.

3.5. Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1. Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang yang dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Wajib.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan, dan Kinerja keuangan.

3. Variabel Moderating (Z)

Variabel moderating adalah variabel yang menjadi variabel kondisional dalam hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah *Shariah Board Quality*

3.5.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1) Variabel dependen

Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Kewajiban atas penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan yang publik di Indonesia diatur oleh standar Ikatan Akuntan Indonesia/IAI dan Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam (Maharani & Budiasih, 2016).

Standar pengungkapan yang harus diungkapkan diatur dalam PSAK Syariah. Instrumen pengukuran proporsi pengungkapan yang digunakan adalah item-item pengungkapan yang dikembangkan dari kriteria penilaian *Annual Report* berdasarkan PSAK sebanyak 65 item. Proporsi *disclosure* setiap bank diukur dengan indeks yaitu total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan dengan skor yang diharapkan (maksimal) dapat diperoleh perusahaan tersebut (Amrin, 2018).

$$TI = \frac{TD}{M} = \frac{\sum_1^m d_i}{\sum_1^n d_i}$$

dimana:

TI = total indeks pengungkapan

TD = total skor pengungkapan

M = skor pengungkapan maksimum seharusnya sebanyak 65 item

D = pengungkapan butir i

m = jumlah aktual pengungkapan butir yang relevan pada setiap perusahaan

n = jumlah butir yang dapat diungkapkan perusahaan

2) Variabel independen

a) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yang dapat mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain (Tandanu & Suryadi, 2020). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total aset, jika semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset}$$

b) Kinerja Keuangan

Kinerja profitabilitas perusahaan adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai profit (Tandanu & Suryadi, 2020). Ukuran kinerja profitabilitas diukur perusahaan ini menggunakan *Return On Asset*. Rumus perhitungan ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3) Variabel Moderating

Variabel moderating dalam hal ini adalah *Shariah Board Quality*. *Corporate governance* dalam Islam merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial - ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah (Najmudin, 2011). Yang dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks pengungkapan tidak tertimbang yang komprehensif yang mencakup semua standar tata kelola AAOIFI yang dikeluarkan pada tahun 2010. AAOIFI merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas Syariah memiliki setidaknya tiga anggota, salah satunya harus memiliki keahlian yang memadai di bidang keuangan Islam daripada yurisprudensi. Selain itu, Ajili & Bouri (2018) menjelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah

harus memiliki kualifikasi akademik dan indeks agregat akan mengukur kualitas tata kelola lebih akurat daripada indikator tunggal. Untuk alasan ini, indeks Dewan Pengawas Syariah digunakan sebagai proxy untuk kualitas Dewan Pengawas Syariah.

Indeks DPS berisi empat atribut papan utama:

1. Keberadaan DPS: 1 jika DPS ada dan 0 sebaliknya;
2. Jumlah anggota DPS: 1 untuk bank dengan 3 atau lebih anggota SB dan 0 lainnya;
3. Keahlian keuangan anggota DPS: 1 jika ada anggota DPS yang memiliki pengalaman di bidang lembaga perbankan syariah dan 0 sebaliknya; dan
4. Kualifikasi doktoral anggota DPS: 1 jika ada anggota DPS yang bergelar doktor dan 0 sebaliknya.

Sejalan dengan penelitian (Ajili & Bouri (2018), penelitian ini menghitung skor untuk indeks DPS dengan menjumlahkan nilai-nilai yang ditetapkan untuk atribut terkait dan kemudian mengubahnya menjadi persentase. Bank Syariah dengan skor DPS rendah dianggap memiliki kualitas DPS yang lebih lemah sedangkan skor yang lebih tinggi dianggap menandakan kualitas DPS yang lebih kuat

$$I = \frac{\sum \text{Score}}{N}$$

dimana:

I = indeks DPS

Score = skor karakteristik Dewan Pengawas Syariah

N = Jumlah skor maksimal 4 item

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dan juga untuk memperoleh gambaran umum sampel data. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, varian, median, minimum, dan maksimum (Sugiyono, 2017). Untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti secara lebih rinci ditetapkan kelas interval untuk masing-masing variabel.

3.6.2. Analisis Regresi dengan Moderasi

Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih independen) (Ghozali, 2018). Menurut Ghozali (2018) tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.6.2.1. Model Regresi

Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap pengungkapan wajib dengan *Shariah*

Board Quality sebagai variabel moderating, digunakan model penelitian sebagai berikut:

$$MD = \beta_0 + \beta_1 KK + \beta_2 UP + \beta_3 SBQ + \beta_4 KK*SBQ + \beta_5 UP*SBQ + \varepsilon$$

Dimana:

MD = Pengungkapan wajib

KK = Kinerja Keuangan

UP = Ukuran Perusahaan

SB = *Shariah Board Quality*

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi

ε = *error*

3.6.2.2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan menggunakan teknik regresi dengan moderasi.

Untuk dapat melakukan regresi ini, model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data extreme atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau

condong ke kanan. Dimana jika sebaran data ini kita nilai secara visual misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas (Ghozali, 2018). Uji normalitas menggunakan grafik histogram. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka modal regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018). Uji normalitas juga digunakan Uji Kolmogorov Sminorv. Adapun kriterianya adalah :

- Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk menentukan apakah model regresi mengidentifikasi korelasi antara variabel independen. Tidak boleh ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang baik. Variabel independen tidak ortogonal jika berkorelasi satu sama lain. Variabel independen dengan nilai korelasi nol di antara mereka disebut variabel ortogonal (Ghozali, 2018). Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflating Factor

(VIF). Jika nilai Tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 dapat diindikasikan adanya multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan nilai statistik F, dan uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t), koefisien determinasi (R^2).

A. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

Kriteria pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

- Jika signifikansi uji F $< 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- Jika signifikansi uji $F > 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yaitu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

B. Uji Statistik T

Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018).

Kriteria pengujian sebagai berikut :

- Jika signifikansi $t < 0,05$ dan arah koefisien beta sesuai dengan arah hipotesis maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

C. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank syariah yang memenuhi kategori :

1. Perbankan syariah dan UUS pada Bank yang listing di BEI
2. Perbankan syariah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 2019-2021 secara lengkap (terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang dimaksud adalah ukuran perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, *syariah board quality*, dan pengungkapan wajib laporan keuangan.)
3. Laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan telah diaudit;
4. Perbankan syariah tidak delisting pada periode tersebut

Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 35 bank syariah yang terdaftar, namun terdapat 5 bank yang tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh tidak lengkapnya publikasi laporan keuangan mereka. Salah satunya adalah Bank OCBC NISP Syariah, sementara tiga Bank besar, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021, sehingga laporan keuangan mereka untuk tahun 2019-2021 tidak lengkap. Dengan periode observasi penelitian selama tiga tahun, maka jumlah laporan bank syariah yang diteliti adalah 90.

Tabel 4.1. Proses Sampling

No	Kriteria	Tahun			Total Sampel
		2019	2020	2021	
1	Total Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021	34	34	33	101
2	Perbankan syariah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 2019-2021 secara lengkap (terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian).	(1)	(1)	(1)	(3)
3	Laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan telah diaudit	(0)	(0)	(0)	(0)
4	Perbankan syariah tidak delisting pada periode tersebut	(3)	(3)	(2)	(8)
Jumlah Sampel		30	30	30	90
Data Outlier					(0)
Total Sampel Penelitian					90

Dari 90 sampel yang dikumpulkan dapat diolah ke dalam statistik deskriptif. Data ini mendeskripsikan gambaran umum variabel sampel data yang digunakan dalam penelitian. Informasi dari setiap variabel berupa nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, serta standar deviasi yang disajikan dalam tabel 4.2 Statistik Deskriptif.

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Minimum	Nilai Maks.	Nilai Median	Rata-Rata	Standar Deviasi
Pengungkapan Wajib	90	,29	,68	,4500	,4663	,08581
Kinerja Keuangan	90	-,06	,11	,0100	,0172	,02472
Ukuran Perusahaan	90	27,30	31,71	29,5500	29,5446	1,16934
Shariah Board Quality	90	,25	1,00	,7500	,7111	,20151
Moderasi 1(KK*SBQ)	90	-,04	,08	,0100	,0119	,01727
Moderasi 2 (UP*SBQ)	90	7,43	31,71	21,9525	21,0584	6,25356

Informasi yang didapat dari tabel 4.2 statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan data pada table uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel Pengungkapan Wajib bernilai minimum 0,29 yang diperoleh Bank BPD Riau Kepri pada tahun 2019 dan Bank BPD Kalbar pada tahun 2019-2020, sedangkan bernilai maksimum 0,68 yang diperoleh Bank BPD NTB Syariah pada tahun 2021. Nilai rata-rata variabel Pengungkapan Wajib 0,4663 sedangkan nilai mediannya 0,4500, menandakan bahwa variabel pengungkapan wajib memiliki nilai yang rendah dari ketentuan yang berlaku. Standar deviasi pada variabel pengungkapan wajib bernilai 0,08581 dan rata-rata bernilai 0,4663 yang

berarti penyebaran data pada variabel pengungkapan wajib banyak variasi atau semakin tidak akurat pada nilai rata-rata.

2. Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan data pada table uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Keuangan Perusahaan bernilai minimum -0,06 yang diperoleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2021 dan Bank Aladin pada tahun 2021, sedangkan bernilai maksimum 0,11 yang diperoleh Bank Aladin pada tahun 2019. Nilai rata-rata variabel Kinerja Keuangan Perusahaan 0,0172 sedangkan nilai mediannya 0,0100 , menandakan bahwa variabel kinerja keuangan perusahaan memiliki nilai yang rendah . Standar deviasi pada variabel kinerja keuangan perusahaan bernilai 0,02472 dan rata-rata bernilai 0,0172 yang berarti penyebaran data pada variabel kinerja keuangan perusahaan merata.

3. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan data pada table uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan bernilai minimum 27,30 yang diperoleh Bank Aladin pada 2019-2020, sedangkan bernilai maksimum 31,71 yang diperoleh Bank CIMB Niaga pada tahun 2021 dan Bnk Muamalat Indonesia pada tahun 2021. Nilai rata-rata variabel Ukuran Perusahaan 29,5446 sedangkan nilai mediannya 29,5500 , menandakan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai yang rendah . Standar deviasi pada variabel ukuran perusahaan bernilai 1,16934 dan rata-rata

bernilai 29,5446 yang berarti penyebaran data pada variabel kinerja keuangan perusahaan tidak merata.

4. *Shariah Board Quality*

Berdasarkan data pada table uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel *Shariah Board Quality* bernilai minimum 0,25 yang diperoleh Bank BPD,Riau Kepri pada tahun 2021 dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019, sedangkan bernilai maksimum 1,00 yang diperoleh Bank CIMB Niaga pada tahun 2019-2021, Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021, Bank Maybank Indonesia pada tahun 2020-2021, Bank BTN pada tahun 2019-2021, Bank Aceh Syariah pada tahun 2020-2021, Bank Danamon pada tahun 2019-2021, Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2019, Bank BPD Sumsel Bangka Belitung pada tahun 2019-2021, Bank BPD Sumbar pada tahun 2019-2021. Nilai rata-rata variabel *shariah board quality* 0,7111 sedangkan nilai mediannya 0,7500, menandakan bahwa variabel *shariah board quality* memiliki nilai yang relative tinggi. Standar deviasi pada variabel *shariah board quality* bernilai 0,20151 dan rata-rata bernilai 0,7111 yang berarti penyebaran data pada variabel kinerja keuangan perusahaan tidak merata.

5. **Moderasi 1 (Kinerja Keuangan* *Shariah Board Quality*)**

Berdasarkan data pada table uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi 1 bernilai minimum -0,04 yang diperoleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2021 dan Bank Aladin pada tahun 2021,

sedangkan bernilai maksimum 0,08 yang diperoleh Bank Aladin pada tahun 2019. Nilai rata-rata variabel moderasi 1 0,0119 sedangkan nilai mediannya 0,0100 , menandakan bahwa variabel moderasi 1 memiliki nilai yang relative rendah . Standar deviasi pada variabel moderasi 1 bernilai 0,01727 dan rata-rata bernilai 0,0119 yang berarti penyebaran data pada variabel moderasi 1 merata.

6. Moderasi 1 (Ukuran Perusahaan * *Shariah Board Quality*)

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi 2 bernilai minimum 7,43 yang diperoleh Bank BPD Riau Kepri pada tahun 2021, sedangkan bernilai maksimum 31,71 yang diperoleh Bank CIMB Niaga pada tahun 2021 dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021. Nilai rata-rata variabel moderasi 2 senilai 21,0584 sedangkan nilai mediannya 21,0584 , menandakan bahwa variabel moderasi 2 memiliki nilai yang relative rendah . Standar deviasi pada variabel moderasi 2 bernilai 6,25356 dan rata-rata bernilai 21,0584 yang berarti penyebaran data pada variabel moderasi 1 tidak merata.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisa regresi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa sampel telah lolos dari normalitas data, multikolonieritas,

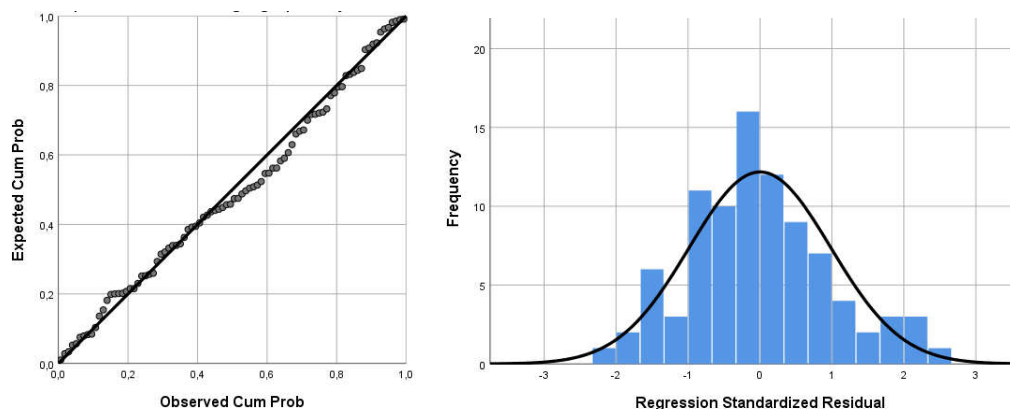
autokorelasi, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi.

4.2.1 Uji Normalitas

Untuk normalitas pada penelitian ini, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal pada variabel dependen, dalam penelitian ini yaitu pengungkapan wajib. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov dan Gambar 4.1. P-P Plot & Histogram dari Regresi Standar Residual.

Tabel 5.1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07825481
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,050
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		



Gambar 5.1 P-P Plot & Histogram dari Regresi Standar Residual

Dari tabel 4.3, didapatkan signifikansi sebesar 0,2. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Selain itu, pada gambar 4.1. distribusi regresi kurang lebih sesuai dengan garis ekspektasi. Maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas yaitu uji glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,262	,494		-,530	,598
Kinerja Keuangan	,170	1,098	,085	,155	,878
Ukuran Perusahaan	,011	,016	,269	,692	,491
Shariah Board Quality	,272	,668	1,107	,407	,685
Moderasi 1 (KK*SBQ)	-,374	1,598	-,131	-,234	,815
Moderasi 2 (UP*SBQ)	-,010	,022	-1,255	-,449	,655

Dapat dilihat dari tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas, nilai signifikansi dari seluruh variabel melebihi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ketentuan dari autokorelasi berdasarkan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dU)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 5.3. Tabel Hasil Uji Durbin-Watson

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
,410 ^a	,168	,139	,07961	1,802

a. Predictors: (Constant), Shariah Board Quality, Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan

b. Variabel Dependen : Pengungkapan Wajib

Dengan membandingkan ketentuan di atas dengan tabel 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson, maka diperoleh :

- Nilai d : 1,802 menunjukkan lebih besar dari nilai dU
- Nilai d : 1,802 menunjukkan lebih kecil dari nilai $4-dU$

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.4 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji

multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflating Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 dapat diindikasikan adanya multikolonieritas.

Tabel 5.6. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kinerja Keuangan	,874	1,144
Ukuran Perusahaan	,880	1,136
Shariah Board Quality	,895	1,118
Moderasi1(KK*SBQ)	,887	1,128
Moderasi2(UP*SBQ)	,882	1,134

Variabel Dependen : Pengungkapan Wajib

Dapat dilihat dari tabel 4.6. Hasil Uji Multikolonieritas, nilai Tolerance dari seluruh variabel melebihi 0,1 dan VIF dari seluruh variabel kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonieritas pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi

4.3.1 Model Regresi

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinieritas, autokorelasi, maupun heteroskedasrisitas. Sehingga data penelitian ini memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linier berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasi atau *moderated regression analysis* (MRA) yang merupakan model regresi dengan melakukan uji interaksi antar variabel. Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap pengungkapan wajib dengan *Shariah Board Quality* sebagai variabel moderating. Model regresi disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.7. Hasil Uji Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
(Constant)	,468	,008	
Kinerja Keuangan	-,1052	,361	-,303
Ukuran Perusahaan	,017	,008	,233
Shariah Board Quality	-,055	,044	-,130
Moderasi1(KK*SBQ)	-3,544	2,499	-,146
Moderasi2(UP*SBQ)	-,061	,035	-,181

$$MD = \beta_0 + \beta_1 KK + \beta_2 UP + \beta_3 SBQ + \beta_4 KK*SBQ + \beta_5 UP*SBQ + \varepsilon$$

$$MD = 0,468 - 0,1052KK + 0,017UP - 0,055SBQ - 3,544KK*SBQ - 0,061 UP*SBQ + \varepsilon$$

Keterangan:

MD : Pengungkapan Wajib

KK : Kinerja Keuangan

UP : Ukuran Perusahaan

SBQ : *Shariah Board Quality*

KK*SBQ: Interaksi Kinerja Keuangan dengan *Shariah Board Quality*

UP*SBQ: Interaksi Ukuran Perusahaan dengan *Shariah Board Quality*

ε : *Error*

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 0,468 dengan koefisien positif yang berarti nilai KK, UP, SBQ, KK*SBQ, UP*SBQ dianggap bernilai 0 atau constant, maka pengungkapan wajib memperoleh nilai 0,468
- b. Variabel KK menghasilkan nilai koefisien negatif 0,1502 yang berarti semakin tinggi nilai KK yang diungkapkan oleh perusahaan tidak memiliki dampak apapun terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.
- c. Variabel UP menghasilkan nilai koefisien positif 0,017 yang berarti semakin tinggi nilai UP yang diungkapkan oleh perusahaan memiliki dampak terhadap besarnya pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.
- d. Variabel SBQ menghasilkan nilai koefisien negatif 0,055 yang berarti semakin tinggi nilai SBQ yang diungkapkan oleh perusahaan tidak memiliki dampak apapun terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.
- e. Variabel Moderasi KK*SBQ menghasilkan nilai koefisien negatif 3,544 yang berarti semakin tinggi nilai KK*SBQ

yang diungkapkan oleh perusahaan tidak memiliki dampak apapun terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.

- f. Variabel Moderasi UP*SBQ menghasilkan nilai koefisien negatif 0,061 yang berarti semakin tinggi nilai UP*SBQ yang diungkapkan oleh perusahaan tidak memiliki dampak apapun terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Ghazali (2018:98).

Berikut hasil uji F :

Tabel 4.8 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.110	3	.037	5,800	.001 ^b
	Residual	,545	86	.006		
	Total	,655	89			

a. Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib

b. Predictors: (Constant), Shariah Board Quality, Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai F menghasilkan nilai signifikansi 0,001 , maka **H₀ ditolak** dan **H_a diterima**. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan *shariah board quality* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

4.4.2 Uji t

Menurut Ghozali (2018:98) Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak H_a diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka H₀ diterima H_a ditolak. Berikut hasil Uji t :

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Keputusan Diterima/ ditolak
	B	Std. Error			
(Constant)	,468	,008	55,377	,000	
Kinerja Keuangan	-,1052	,361	-2,918	,005	Ditolak
Ukuran Perusahaan	,017	,008	2,249	,027	Diterima
Shariah Board Quality	-,055	,044	-1,263	,210	Ditolak
Moderasi1(KK*SBQ)	-3,544	2,499	-1,418	,160	Ditolak
Moderasi2(UP*SBQ)	-,061	,035	-1,753	,083	Ditolak

Dependen: Pengungkapan wajib

Berdasarkan table Uji t dari persamaan pertama diatas menunjukkan bahwa :

1. Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan ditunjukkan dengan nilai signifikan adalah $0,005 < \alpha = 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar $- 0,1052$, maka H0 diterima dan H1 **ditolak**. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib ditunjukkan dengan nilai signifikan adalah $0,027 < \alpha = 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar $0,017$ positif, maka H0 ditolak dan H1 **diterima**. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan
3. Pengaruh *shariah board quality* terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan ditunjukkan dengan nilai signifikan adalah $0,210 > \alpha = 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar $0,055$ negatif, maka H0 diterima dan H1 **ditolak**. Hal ini berarti bahwa *shariah board quality* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.
4. Pengaruh *shariah board quality* untuk memoderasi terhadap kinerja keuangan perusahaan pada pengungkapan wajib laporan keuangan ditunjukkan dengan nilai signifikan adalah $0,160 > \alpha = 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar $3,544$ negatif, maka H0 diterima dan H1 **ditolak**.

Hal ini berarti bahwa *shariah board quality* bukan sebagai moderator dalam hubungan antara kinerja keuangan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

5. Pengaruh *shariah board quality* untuk memoderasi terhadap ukuran perusahaan pada pengungkapan wajib laporan keuangan ditunjukkan dengan nilai signifikan adalah $0,083 > \alpha = 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar 0,061 negatif, maka H_0 diterima dan H_1 **ditolak**. Hal ini berarti bahwa *shariah board quality* bukan sebagai moderator dalam hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

4.4.3 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi dependen sangat terbatas. Sedangkan Nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424 ^a	,180	,141	,07952

a. Predictors: (Constant), Moderate2, Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Moderate1

Berdasarkan tabel pada model regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,141. Hal ini berarti bahwa variabel kinerja keuangan, ukuran perusahaan, interaksi antara kinerja keuangan dengan *shariah board quality* dan interaksi antara ukuran perusahaan dengan *shariah board quality* mampu menjelaskan variabel pengungkapan wajib sebesar 14,1% dan sisanya sebesar 85,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel bebas yang diteliti.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, maka dapat dijelaskan ke dalam sub bab berikut ini :

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil yang didapatkan untuk menguji hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,017 positif dan nilai signifikan adalah 0,027 yang memiliki nilai lebih rendah dari nilai α (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Hipotesis 1 diterima

Hal ini sejalan dengan prinsip teori keagenan yang mendalilkan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi

secara sukarela untuk mengurangi biaya agensi yang timbul antara perusahaannya dengan para stakeholdersnya.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total aset, jika semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Oleh sebab itu semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nassreddine, 2016; Pradipta et al., 2016; Amrin, 2018; Permata, 2013 ; Agustina, 2012; Alfiani, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Maharani & Budiasih, 2016) dan (Widati & Wigati, 2011)

2. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil yang didapatkan untuk menguji hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,1052 negatif dan nilai signifikan adalah 0,005 yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai α (0,05). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja

keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hipotesis 2 ditolak

Dari perhitungan statistik deskriptif tiap variabel, diketahui bahwa nilai rata-rata sampel mampu mendapatkan *return on assets* (ROA) sebesar 1,7%. Dalam konteks perbankan syariah, ROA yang berada di kisaran 1,5% hingga 2% dianggap sebagai indikasi kinerja keuangan yang sehat.

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang rendah mungkin merasa perlu untuk lebih transparan guna membangun atau mempertahankan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengungkapkan lebih banyak informasi, mereka dapat menunjukkan bahwa meskipun sedang mengalami kesulitan, mereka berkomitmen untuk memperbaiki situasi dan tetap bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pihak lain. Perusahaan yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan ingin menjaga reputasi mereka di mata publik mungkin merasa bahwa keterbukaan yang lebih besar adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka tetap beroperasi secara etis meskipun dalam situasi sulit. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi mungkin merasa tidak perlu memberikan pengungkapan yang lebih mendetail karena mereka percaya bahwa kinerja mereka sudah cukup menunjukkan bahwa mereka dikelola dengan baik. Mereka mungkin berpikir bahwa pengungkapan tambahan tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Pengungkapan yang lebih

mendetail bisa berarti biaya tambahan dalam hal waktu dan sumber daya untuk menyusun laporan yang lebih rinci. Perusahaan mungkin memilih untuk meminimalkan biaya ini dengan hanya memenuhi persyaratan minimum pengungkapan. Dan juga jika perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi melakukan pengungkapan yang lebih luas, maka perusahaan pesaing dapat lebih gampang mengetahui rencana yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat melemahkan posisi perusahaan dalam persaingan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Maharani & Budiasih, 2016; Sinurat & Sembiring, 2016), yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan . Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Pratiwi, 2015) dan (Alfiani, 2019)

3. Pengaruh *Shariah Board Quality* sebagai pemoderasi antara hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Hasil yang didapatkan untuk menguji hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,061 negatif dan nilai signifikan adalah 0,083 yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai α (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.

Hal ini dikarenakan fungsi DPS hanya sebatas memberikan rekomendasi dan persetujuan produk-produk syariah. Selain itu, jumlah DPS pada sebagian besar bank syariah masih belum memenuhi kriteria dari badan internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions* (AAOIFI) yang menyatakan minimal terdapat tiga orang anggota DPS pada bank syariah, sedangkan sebagian besar bank syariah di Indonesia rata-rata hanya memiliki dua orang anggota, sehingga belum ada indikasi yang menunjukkan adanya hubungan antara besar kecilnya ukuran perusahaan dengan jumlah DPS di perusahaan tersebut. Mandat DPS terbatas pada pemantauan dan memastikan bahwa produk, layanan, dan operasi perusahaan sesuai dengan hukum Syariah. Ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan laporan keuangan mungkin berada di luar lingkup pengawasan DPS. Ini menyebabkan DPS, meskipun berkualitas tinggi, tidak memainkan peran yang besar dalam memoderasi bagaimana perusahaan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Mahardikasari & Aryani, 2019), yang menyatakan bahwa *shariah board quality* bukan sebagai pemoderasi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan . Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Ajili & Bouri, 2018)

4. Pengaruh *Shariah Board Quality* sebagai pemoderasi antara hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Hasil yang didapatkan untuk menguji hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 3,544 negatif dan nilai signifikan adalah 0,160 yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai α (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi DPS karena DPS hanya memastikan bahwa operasional dan produk keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Fokus ini lebih pada aspek kepatuhan syariah dan etika dalam transaksi dan produk keuangan, daripada pada aspek pelaporan keuangan konvensional. Oleh karena itu, meskipun DPS berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan syariah mematuhi hukum Syariah, mereka mungkin kurang terlibat dalam aspek operasional lain, seperti pengungkapan keuangan yang wajib.

Manajemen perusahaan seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan terkait pengungkapan laporan keuangan. Meskipun DPS bisa memberikan nasihat atau panduan, keputusan akhir tentang pengungkapan keuangan biasanya dibuat oleh manajemen dan dewan direksi. Jika manajemen memutuskan untuk mengurangi pengungkapan karena kinerja keuangan yang buruk, pengaruh DPS mungkin terbatas, bahkan jika DPS berkualitas tinggi. Pengukuran kinerja keuangan dalam konteks konvensional (seperti ROA, ROE, atau

laba bersih) mungkin tidak selalu berkorelasi langsung dengan indikator kepatuhan Syariah yang diawasi oleh DPS. DPS mungkin lebih fokus pada kinerja berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (seperti distribusi zakat, penghindaran riba, atau pelaksanaan kontrak syariah), yang tidak selalu tercermin dalam pengungkapan laporan keuangan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Mahardikasari & Aryani, 2019), yang menyatakan bahwa *shariah board quality* bukan sebagai pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan perusahaan pada pengungkapan wajib. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Ajili & Bouri, 2018).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan dengan *shariah board quality* sebagai moderasi pada bank syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Oleh sebab itu semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan.
2. Kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal tersebut dikarenakan jika perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi melakukan pengungkapan yang lebih luas, maka perusahaan pesaing dapat lebih gampang mengetahui rencana yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat melemahkan

posisi perusahaan dalam persaingan, karena lemahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

3. *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi antara hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dikarenakan fungsi DPS hanya sebatas memberikan rekomendasi dan persetujuan produk-produk syariah. Selain itu, jumlah DPS pada sebagian besar bank syariah masih belum memenuhi kriteria dari badan internasional Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI), sehingga belum ada indikasi yang menunjukkan adanya hubungan antara besar kecilnya ukuran perusahaan dengan jumlah DPS di perusahaan tersebut.
4. *Shariah Board Quality* bukan sebagai pemoderasi antara hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan sehingga hipotesis keempat ditolak. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi DPS untuk pengawasan kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial secara islam. Selain itu, jumlah DPS setidaknya terdapat tiga orang anggota DPS pada bank syariah, sedangkan sebagian besar bank syariah di Indonesia rata-rata hanya memiliki dua orang anggota sehingga pengawasan terhadap aktivitas dan tanggung jawab sosial bank syariah masih belum terkontrol.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Populasi penelitian ini terbatas pada bank syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021, sehingga tidak bisa mewakili seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Sebagian besar bank syariah masih belum memenuhi kriteria dari badan internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions* (AAOIFI) dalam penetapan Dewan Pengawas Syariah yang bisa memudahkan dalam menentukan *shariah board quality*.
3. Pada periode tahun sampling terdapat 3 bank syariah besar yang merger menjadi satu sehingga harus mengurangi jumlah sampel bank syariah yang mana bank tersebut merupakan bank syariah terbesar di Indonesia.
4. Kemampuan variabel independen berupa kinerja keuangan, ukuran perusahaan serta variabel moderasi berupa *shariah board quality* dalam mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan hanya sebesar 14,1% dan sisanya sebesar 85,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut diteliti pada penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Mengingat masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian khususnya terkait populasi dan periode penelitian yang dikaitkan dengan penggunaan standar pelaporan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions* (AAOIFI), maka untuk pihak akademisi yang dapat melakukan penelitian selanjutnya disarankan melakukan beberapa hal berikut yaitu **pertama**, memperluas populasi penelitian dengan mencakup bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah serta bank syariah lainnya yang tidak terdaftar di BEI. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai industri perbankan syariah di Indonesia. **Kedua**, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana bank syariah dapat memenuhi kriteria AAOIFI dalam penetapan Dewan Pengawas Syariah. Ini termasuk studi kasus atau penelitian kualitatif yang mendalam. **Ketiga** disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan seperti, kepatuhan terhadap regulasi, dan inovasi teknologi. Kepatuhan terhadap peraturan memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar minimum pelaporan keuangan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Perusahaan yang secara ketat mematuhi peraturan cenderung melakukan pengungkapan keuangan yang komprehensif untuk menghindari penalti dan menjaga reputasi mereka di pasar. Inovasi teknologi dalam proses pelaporan keuangan memungkinkan perusahaan menyediakan informasi keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan rinci. Penggunaan sistem teknologi canggih dapat menyederhanakan pengumpulan dan pelaporan data, sehingga mengarah pada peningkatan praktik pengungkapan.

Keempat, disarankan untuk menambah indikator dalam penilaian kualitas Dewan Pengawas Syariah seperti, Jumlah rapat dewan, serta bagaimana audit dan review syariah dilakukan secara rutin. Audit syariah secara berkala dan review terhadap operasional perusahaan dengan sistem yang baik untuk memantau produk baru dan operasional perusahaan guna memastikan kesesuaiannya dengan hukum syariah.

2. Bagi Perusahaan

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian khususnya masih adanya perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian yang belum mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions* (AAOIFI) dalam pelaporannya, maka disarankan kepada perusahaan-perusahaan tersebut **pertama**, untuk meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah dengan berupaya memenuhi kriteria AAOIFI dalam penetapan Dewan Pengawas Syariah untuk meningkatkan *shariah board quality* dan kepercayaan investor. **Kedua**, meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengungkapan

laporan keuangan, serta mempertimbangkan untuk menyertakan variabel tambahan yang relevan dalam laporan mereka.

3. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diketahui bahwa pengungkapan laporan perusahaan masih cenderung rendah, sehingga disarankan kepada pemerintah untuk yang **pertama**, Pemerintah diharapkan mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan mendukung bank syariah untuk memenuhi standar internasional seperti AAOIFI. Ini termasuk memberikan insentif atau program pelatihan bagi bank untuk meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah.. **Kedua** memberikan atensi lebih pada kebijakan kaitannya dengan pelaksanaan dan pengungkapan laporan keuangan.

4. Bagi Investor

Pertama, investor disarankan memperhatikan size perusahaan dalam berinvestasi karena perusahaan tersebut lebih transparan dalam mengungkapkan informasi sehingga dapat meminimisir kekliruan dalam pengambilan keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Basuki, Hidayat, I., & Alpiani, R. (2020). Financial Factors And Mandatory Disclosures Dirvi. *International Journal Of Multi Science*, 1(6), 20–30.
- Agustina, L. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.15294/Jda.V4i1.1960>
- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Assessing The Moderating Effect Of Shariah Board On The Relationship Between Financial Performance And Accounting Disclosure. *Managerial Finance*, 44(5), 570–589. <https://doi.org/10.1108/Mf-05-2017-0192>
- Alfiani. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Keluasan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan*.
- Alvionita, I., & Taqwa, S. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. *Simposium Nasional Akuntansi 17, 2002*, 1–23.
- Amrin, A. (2018). Karakteristik Perusahaan Dalam Praktik Pengungkapan Wajib Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(4), 346–359.
- Ayu, D. P., & Suarjaya, A. A. G. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(2), 1112–1138. <https://doi.org/10.24843/Eeb.2018.V07.I08.P03>
- Azid, T., & Alnodel, A. A. (2019). Determinants Of Shari'ah Governance Disclosure In Financial Institutions: Evidence From Saudi Arabia. *International Journal Of Ethics And Systems*, 35(2), 207–226. <https://doi.org/10.1108/Ijoes-07-2018-0111>
- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2009). Development In Legal Issues Of Corporate Governance In Islamic Finance. *Journal Of Economic And Administrative Sciences*, 25(1), 67–91. <https://doi.org/10.1108/10264116200900004>
- Dewi, V. S., & Ekadjaja, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Ukuran

- Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(1), 118–126.
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V6i2.89-108>
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6–15. <https://doi.org/10.29264/Jkin.V14i1.2444>
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case Of Islamic Banks. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25* (9th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, E. (2008). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 12(1), 53–64.
- Houston, B. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Istiningrum, A. A. (2016). Karakteristik Perusahaan Sebagai Antecedent Pengungkapan Wajib Informasi Akuntansi. *Jurnal Economia*, 12(1), 67. <https://doi.org/10.21831/Economia.V12i1.8808>
- Jarwono, R., & Nasir, A. (2020). *Jurnal Politeknik Caltex Riau Determinasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. 13(2), 50–59.
- Jayanti, F. D. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 3(2), 34–44.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 959–976. <https://doi.org/10.24036/Jea.V1i3.120>

- Maharani, L. G. P., & Budiasih, I. G. A. . (2016). Pengaruh Ukuran, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Dan Profitabilitas Pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 34–52.
- Mahardikasari, M., & Aryani, Y. A. (2019). Islamic Corporate Governance Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kinerja Keuangan Dan Islamic Social Reporting. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(02), 102–112.
- Munawir. (2006). *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty.
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Andi.
- Nassreddine, G. (2016). Determinants Of Financial Information Disclosure: A Visualization Test By Cognitive Mapping Technique. *Journal Of Economics, Finance And Administrative Science*, 35, 6. <https://doi.org/10.1016/j.jefas.2016.03.002>
- Noordin, N. H., & Kassim, S. (2019). Does Shariah Committee Composition Influence Shariah Governance Disclosure?: Evidence From Malaysian Islamic Banks. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 10(2), 158–184. <https://doi.org/10.1108/Jiabr-04-2016-0047>
- Nugraha, R. A., & Alfarisi, M. F. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Mirai Managemnt*, 5(2), 370–377.
- Permata, T. I. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, Dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(2), 118–136.
- Pradipta, F., Topowijono, & Azizah, D. . (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 36(1), 101–110.
- Pratiwi, R. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(1), 85–97.
- Santioso, L., & Yenny, Y. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *The Winners*, 13(2), 81–92. <https://doi.org/10.21512/Tw.V13i2.654>

- Serly, S., & Susanti, A. (2021). Corporate Governance Analysis Of Quality Disclosure Of Non-Financial Financial Statements In Indonesia Stock Exchange Companies. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 194. <https://doi.org/10.20473/Baki.V6i2.26325>
- Sinurat, D. N. B., & Sembiring, E. R. (2016). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan Dan Status Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 2(1), 63–82.
- Suciwati, D., Pradnyan, D., & Ardina, C. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bei Tahun 2010-2013). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(2), 104–113.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi Offset.
- Susanto, C. M., & Ardini, L. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7). <https://doi.org/10.25105/Mraai.V13i1.1735>
- Tandanu, A., & Suryadi, L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(1), 108–117.
- Widati, L. W., & Wigati, R. (2011). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, 18(2), 137–153.
- Widianingsih, D. (2018). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Csr Sebagai Variabel Moderating Dan Firm Size Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 38–52. <https://doi.org/10.29040/Jap.V19i1.196>
- Widjayanti, S. A. (2015). Pengaruh Struktur Dan Mekanisme Corporate Governance Pada Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi Ifrs Septri Ari Widjayanti. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(7), 1–21.